



MATRIK KURIKULUM PELATIHAN TENAGA AHLI DAN PENDAMPING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	iii
A. LATAR BELAKANG	
1. Tujuan Intruksional Umum (TIU)	
2. Tujuan Intruksional Khusus (TIK)	
B. RUANG LINGKUP	
C. TUJUAN PELATIHAN	
D. STRUKTUR PELATIHAN	
E. SUSUNAN MATERI PELATIHAN	
F. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN	
Pokok Bahasan 1: Visi Undang-undang Desa	
Pokok Bahasan 2: Undang-undang Desa dan Inklusi Sosial	
Pokok Bahasan 3 Nomenklatur Desa Adat	
Pokok Bahasan 4: Kewenangan dan Produk Hukum Desa	
Pokok Bahasan 5: Sistem Pembangunan Desa	



Pokok Bahasan 6: Demokratisasi Tata Kelola Kelembagaan Desa

Pokok Bahasan 7: BUMDes dan Pengembangan Ekonomi Desa

Pokok Bahasan 8: Pengembangan Desa

Pokok Bahasan 9: Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pokok Bahasan 10 : Peran dan Komitmen Tenaga Ahli



MATRIKS KURIKULUM PELATIHAN TENAGA AHLI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. LATAR BELAKANG

Pengesahan Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 (UU Desa) menandai dibukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Di samping memberikan dasar hukum bagi keberadaan desa, UU Desajuga menghadirkan cara pandang baru dalam melihat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa diakui sebagai subyek yang berkewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan. Setiap anggota masyarakatnya boleh dan diakui haknya untuk ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Untuk kemajuan desa bahkan pemerintah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Mendampingi, bukan untuk menentukan, tetapi memberdayakan desa untuk semakin kuat menjadi mandiri.

Begitu mendasarnya perubahan yang ditawarkan UU Desa dan luasnya ruang lingkup wilayah geografis sehingga implementasi visi UU Desa membutuhkan kesanggupan kerja sinergis berbagai pihak. Salah satunya adalah menyangkut kesiapan pemerintah baik dalam menyiapkan tata kelola dan penyesuaian kerja birokrasi, maupun dalam melakukan pendampingan masyarakat desa. Pendampingan yang dilakukan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 bertujuan;

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.



Untuk tujuan pendampingan itu, pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli profesional dan pihak ketiga (UU Desa Psl 112, ayat 4 dan PP 43, Psl 128 ad 2). Tenaga ahli profesional yang dimaksud adalah pendamping desa, tenaga teknik, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa (Permendes No.3/2015 Psl. 5). Meskipun tenaga ahli profesional adalah personalia yang berpengalaman dibidang yang dibutuhkan, namun tidak bisa dinafikan bahwa dalam kerangka kerja implementasi UU Desa, Tenaga Ahli perlu memahami substansi dan perspektif baru. Karena itu di samping peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah, perlu juga peningkatan kapasitas Tenaga Ahli, untuk membantu terselenggaranya kerja-kerja optimal demi terwujudnya visi UU Desa.

Sehubungan dengan itu dibutuhkan Tenaga Ahli yang memiliki komitmen dan kemampuan yang memadai terkait dengan 1) pengetahuan tentang visi serta kebijakan terkait UU Desa, (2) kemampuan mengkoordinasi kerja dan meningkatkan kemampuan Pendamping Desa, (3) kemampuan memediasi kerja tata kelola pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota,, pemerintah desa dan tata kelola lembaga masyarakat desa. (4) sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi serta profesi Tenaga Ahli dalam melakukan kerja bantuan teknis keahlian sesuai bidang yang dibutuhkan.

Salah satu sarana untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Ahli dalam melakukan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah pelatihan atau proses pembelajaran. Materi pelatihan dari aspek substansi tidak berbeda dengan materi pelatihan yang juga dikembangkan untuk pendamping desa lain maupun Setrawan dari satuan kerja pemerintah daerah. Namun manajemen dan tuntutan pencapaian dari pelatihan dikelola khusus menyesuaikan dengan tuntutan tugas dan fungsi Tenaga Ahli dengan tuntutan kualifikasi dan latar belakangnya lebih bersifat khusus.

Atas dasar kebutuhan tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Desa dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menginisiasi penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli untuk mendorong implementasi UU Desa. Diharapkan pelatihan ini dapat menambahkan perspektif pengetahuan dan sikap yang memadai bagi para Tenaga Ahli dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengefektifkan kerja-kerja untuk implementasi UU Desa.

B. RUANG LINGKUP

Kurikulum Pelatihan Setrawan disusun dengan maksud memberikan kerangka acuan dalam penyelenggaraan pelatihan Setrawan sebagai Pendampingan Desa agar siap mengawal pendampingan implementasi UU Desa.



Selanjutnya, dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Setrawan Pendamping Desa maka disusun paket pelatihan yang terdiri dari:

- (1) Petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan Setrawan Pendamping Desa;
- (2) Matrik Kurikulum Pelatihan Setrawan Pendamping Desa;
- (3) Panduan Pelatih dalam memfasilitasi proses pembelajaran bagi Setrawan Pendamping Desa.

C. TUJUAN PELATIHAN

Tujuan Pelatihan Setrawan Pendamping Desa, yaitu:

1. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Peserta memiliki kompetensi Sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

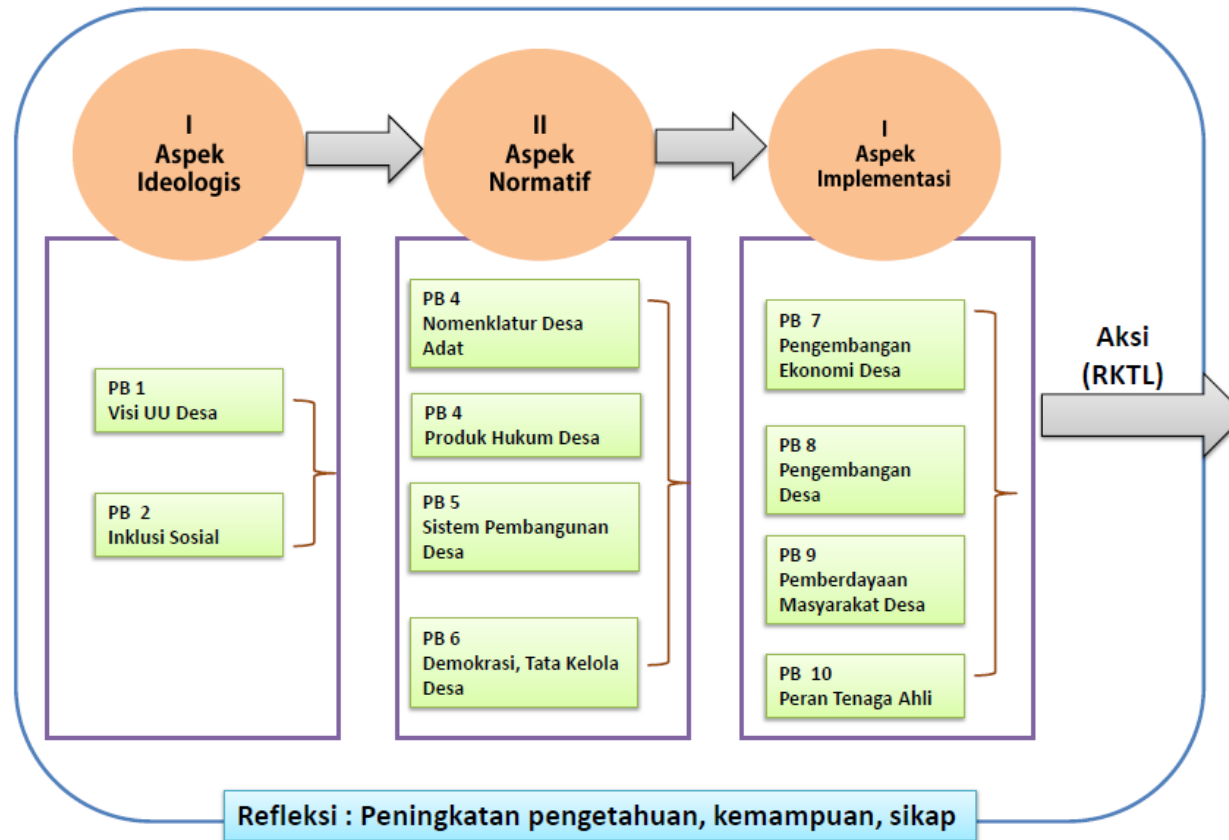
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- (1) Memahami perspektif dan semangat implementasi Undang-Undang Desa;
- (2) Memahami peran fungsi Tenaga Ahli dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (3) Mampu melakukan pengorganisasian potensi dan peran para pihak dalam mewujudkan visi Undang-undang Desa
- (4) Mampu memfasilitasi kebutuhan penyelarasan tata kelola Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan masyarakat desa
- (5) Mampu menguatkan dan memfasilitasi peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Pendamping Desa



- (6) Mampu menentukan langkah strategis mendorong para pihak; unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun masyarakat dalam melakukan advokasi regulasi untuk menguatkan kemandirian Desa
- (7) Mampu melakukan kerja-kerja jaringan dan menyusun langkah-langkah strategis untuk penguatan peran dan fungsi Pendamping Desa

D. SKEMA ALUR PELATIHAN TENAGA AHLI



E. SUSUNAN MATERI PELATIHAN



No	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	KOMPETENSI			JP (menit)
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	
1	2	3	4			5
	Dinamika Kelompok dan Pengorganisasian Peserta	Perkenalan				Bukan bagian dari materi
		Pre Test				
		Harapan Peserta				
1	Visi Undang-undang Desa	1. Visi Perubahan Sosial Desa	√		√	180
		2. Struktur UU Desa dan Identifikasi Perubahan Desa	√		√	135
		3. Ruang Strategis Implementasi UU Desa	√		√	90
2	UU Desa dan Inklusi Sosial	1. Inklusi Sosial				135
		2. Identifikasi Marginalisasi Kelompok Sosial Desa				90
		3. Optimasi Peran Kelompok Sosial Termarjinalkan				135
3	Nomenklatur Desa Adat	1. Desa Adat dalam Bingkai Kebhinekaan	√			135
4	Kewenangan dan Produk Hukum Desa	1. Kewenangan Desa	√		√	135
		2. Jenis-jenis Produk Hukum Desa	√		√	90
		3. Mekanisme Pengambilan Keputusan	√		√	90
		4. Hubungan Peraturan Desa Terkait Produk Hukum Lain	√		√	135
5	Sistem Pembangunan Desa	1. Peran Masyarakat dalam Musyawarah Desa	√	√	√	90
		2. Perencanaan Pembangunan Desa	√		√	135
		3. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	√		√	90
		4. Penganggaran Pembangunan Desa	√		√	180
6	Demokratisasi dan Tata Kelola Masyarakat Desa	1. Demokratisasi dan Tata Kelola Masyarakat Desa	√		√	135
		2. Ruang Publik dan Demorasi Deliberatif	√		√	90



7	BUMDes dan Pengembangan Ekonomi Desa	1. Potensi dan Aset Ekonomi Desa	√		√	180
		2. BUMDes sebagai Pendorong Ekonomi Desa	√		√	180
8	Pengembangan Desa	1. Desa Mandiri	√	√	√	90
		3. Pengembangan Wilayah Desa	√	√	√	90
9	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Analisis Sosial Ketidakberdayaan Desa	√	√	√	180
		2. Pemberdayaan Menuju Perubahan Sosial Desa	√	√	√	135
10	Peran Tenaga Ahli	1. Kecakapan Komunikasi Sosial Tenaga Ahli	√	√	√	90
		2. Peran dan Strategi Tenaga Ahli dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	√	√	√	135
	Rekap	Simpulan pokok-pokok bahasan, post test				3.150
JUMLAH JAM PELAJAR (MENIT)						

A. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN (SILABUS)

Garis besar program pelatihan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari tiga materi utama baik mencakup pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Masing-masing bagian terbagi ke dalam aspek yang lebih khusus. Alur pelatihan dimulai dengan membangun perspektif pemahaman tentang visi perubahan sosial desa yang diamanatkan UU Desa No.6 Tahun 2014. Untuk membantu peserta memahami relevansi gagasan ideal visi perubahan desa dengan kenyataan hidup berdesa, termasuk pada bagian awal ini peserta didorong untuk belajar mengenali ruang-ruang strategis implementasi UU Desa.

Selanjutnya peserta diajak untuk mengenal dan memahami aspek normatif terkait dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang menjadi dasar tata kelola atau pelaksanaan implementasi UU Desa. Bobot dari bagian kedua garis besar program pelatihan terletak



pada kemampuan memahami aspek normatif. Meskipun demikian dalam pelatihan ini peserta diajak juga memahami aspek keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendampingi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Kemampuan memahami perspektif ideologis UU Desa dan kemampuan mengenali regulasi, aturan main merupakan aspek fundamental yang dibutuhkan Tenaga Ahli dalam mengoptimasi peran serta fungsinya. Selanjutnya dibutuhkan tingkat keterampilan, kreatifitas dan sikap yang memadai untuk menerjemahkan nilai-nilai ideologis dan dormatif itu ke dalam tindakan pendampingan. Kebutuhan itu akan dipenuhi dari materi bagian terakhir yang menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan Tenaga Ahli dalam memahami dan secara terampil menempatkan tugas pemberdayaan sebagai komitmen untuk menjadi bagian dari gerakan kerja budaya mewujudkan kemandirian Desa.

1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
1	1. Visi Undang-undang Desa	1.1. Visi Perubahan Sosial Desa	mengenali kondisi desa yang tertinggal dan sebab-sebabnya memahami keterkaitan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa sebagai dengan rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama pengaturan desa memahami pandangan masa depan (prospek) perubahan desa ssebagaimana diamanatkan UU Desa mengenali dan memahami ruang strategis implementasi UU Desa	Mampu menjelaskan alasan mengapa orang-orang desa banyak yang lebih suka meninggalkan desa . Mampu menjelaskan visi UU Desa tentang perubahan desa yang lebih maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis Mampu menjelaskan pemahaman tentang hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa dan kaitannya dengan azas pengakuan (<i>rekognisi</i>) dan pelaksanaan kewenangan (<i>subsidiaritas</i>) dalam kaitannya dengan UU Desa			180
2		1.2. Struktur UU Desa dan Identifikasi Potensi		Mampu menjelaskan struktur UU Desa			135



1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
		Perubahan Desa		Mampu mengidentifikasi potensi perubahan mendasar terkait implementasi UU Desa			
3		1.3. Ruang Strategis Implementasi UU Desa		Mampu menjelaskan arti ruang strategis implementasi UU Desa Mampu menjelaskan contoh nyata potensi ruang-ruang strategis yang ada di desa Mampu menjelaskan langkah-langkah analitis untuk menemukan peluang ruang-ruang strategis implementasi UU Desa			90
4	2. UU Desa dan Inklusi Sosial	2.1. Inklusi Sosial	Memahami konsep dasar dan inklusi sosial sebagai azas demokrasi Memahami pentingnya inklusi sosial sebagai perwujudan semangat egaliter dan partisipatif dalam pembangunan Desa	Menjelaskan konsep dasar, prinsip dan indikator inklusi sosial Menjelaskan pentingnya pendekatan inklusi sosial dalam pembangunan desa			135
5		2.2. Identifikasi Marginalisasi Kelompok Sosial Desa	Memahami terjadinya marginalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat desa	Mengidentifikasi ketimpangan sosial-ekonomi-budaya yang ada di desa, marginalisasi yang dialami oleh kelompok miskin,			90



1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
				<p>perempuan dan anak.</p> <p>Membongkar korelasi antara kepentingan Negara, pemilik modal dan masyarakat sipil sebagai obyek.</p> <p>Mempersoalkan kemiskinan, perempuan dan anak menjadi korban kekuasaan, ketidakadilan kepentingan dan gender.</p>			
6	3. Nomenklatur Desa Adat		Memahami dasar pemikiran, latar belakang sosioantropologis, historis dan yuridis nomenklatur Desa Adat	<p>Mampu menjelaskan arti strategis munculnya nomenklatur desa adat</p> <p>Mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan nomenklatur desa adat dan desa administrasi dalam kerangka Kebhinekaan Indonesia</p>			135
7	4. Kewenangan dan Produk Hukum Desa	4.1. Kewenangan Desa	Mampu memahami latar belakang, pengertian dan ruang lingkup kewenangan	Mampu menjelaskan latar belakang dan pengertian kewenangan berdasarkan hak			135



1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
			desa (hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa)	asal usul dan kewenangan lokal berskala desa			
			Mampu memahami pengertian, ruang lingkup, jenis dan kedudukan peraturan desa	Mampu menemukan dan menjelaskan contoh kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa			
8		4.2. Jenis Produk Hukum	Mampu memahami mekanisme pengambilan keputusan dalam tahap dan tata peyusunan peraturan desa	Mampu menjelaskan pengertian dan kedudukan peraturan-peraturan desa dalam kehidupan berdesa Mampu menjelaskan fungsi dan jenis-jenis peraturan desa			90
9		4.3. Mekanisme Pengambilan Keputusan	Mampu mengenali dan memahami hubungan struktural peraturan desa dengan produk hukum lain	Mampu menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan dalam tahap dan tata peyusunan peraturan desa			90
10		4.4. Hubungan Peraturan Desa dengan Produk Hukum Lain		Mampu menjelaskan kedudukan peraturan desa dalam hubungannya dengan produk hukum lain Mampu menjelaskan fungsi hubungan struktural peraturan desa dengan produk hukum lain			135
11	5. Sistem Pembangunan Desa	5.1. Musyawarah Desa dan Ruang Terbuka Desa	Memahami musyawarah desa sebagai ruang terbuka terjadinya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Mampu menjelaskan musyawarah desa sebagai ruang terbuka terjadinya partisipasi masyarakat dalam membangun desa			90



1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
12		5.2. Perencanaan pembangunan desa	Memahami perencanaan, pembangunan, penganggaran sebagai misi strategis pembangunan desa yang pro rakyat	Mampu menjelaskan prinsip inklusi dan emansipasi dalam musyawarah desa yang partisipatif			135
				Mampu menjelaskan perencanaan sebagai kesempatan memperjuangkan misi strategis membangun desa yang pro rakyat			
				Mampu menjelaskan pengertian pembangunan desa yang pro rakyat			
13		5.3. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		Mampu menjelaskan pentingnya pengawasan pembangunan desa sebagai bagian dari azas akuntabilitas (terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan_			90
14		5.4. Penganggaran Pembangunan Desa		Mampu menjelaskan penganggaran sebagai tahap menentukan perwujudan misi pembangunan desa yang pro rakyat			180
15	6. Demokratisasi Tata Kelembagaan Desa dan Ruang Publik	6.1. Demokratisasi dan Tata Kelola Kelembagaan Desa	Memahami Kelembagaan Desa sebagai Tata Kelola yang Demokratis. Memahami pengertian	Mampu menjelaskan tentang hakekat tata kelola kelembagaan desa yang demokratis			135



1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
			<p>dan semangat deliberasi dalam perspektif UU Desa.</p> <p>Memahami keterkaitan partisipasi warga pada perencanaan pembangunan desa sebagai peluang warga untuk menentukan tujuan pengembangan aset dan potensi ekonomi desa.</p>	<p>Mampu mengidentifikasi bentuk/sosok demokrasi desa yang tepat dengan konteks kekinian dan konteks lokal.</p> <p>Mampu mengenal relasi yang demokratis dalam hubungan antara kepala desa, BPD, dan masyarakat.</p>			
16		6.2. Ruang Publik dan Demokrasi Deliberatif		<p>Mampu mengidentifikasi pengertian dan semangat deliberasi dalam perspektif UU Desa.</p> <p>Mampu menjelaskan perbedaan demokrasi klasik dengan demokrasi deliberatif</p> <p>Menjelaskan makna desa sebagai ruang publik atau ruang deliberasi</p> <p>Mampu menjelaskan keterkaitan partisipasi warga pada perencanaan pembangunan desa sebagai peluang warga untuk</p>			90



1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
				menentukan tujuan pengembangan aset dan potensi ekonomi desa.			
17	7. BUMDes dan Pengembangan Ekonomi Desa	7.1. Potensi dan Aset Ekonomi Desa	Memahami Perencanaan Pembangunan Desa sebagai sarana keberpihakan terhadap rakyat. Memahami Kaitan Perencanaan Pembangunan Desa dengan partisipasi dan keswadayaan warga aktif	Menjelaskan keterkaitan partisipasi warga pada perencanaan pembangunan desa sebagai peluang warga untuk menentukan tujuan pengembangan aset dan potensi ekonomi desa. Mengidentifikasi asset potensial desa dan memetakan potensi ekonomi desa Menganalisis peluang pengembangan kegiatan ekonomi desa			180
18		7.2. BUM Desa sebagai Pendorong Pengembangan Ekonomi Desa		Menjelaskan azas, peran dan fungsi BUMDesa dalam kerangka visi UU Desa Merumuskan peran dan langkah strategis dalam mendorong masyarakat dan			180



1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
				para pihak untuk pengembangan ekonomi desa			
19	8. Pengembangan Desa	8.1. Desa Mandiri	Memahami pengertian dan prinsip-prinsip dasar "desa membangun" sebagai wujud kemandirian desa Memahami kedekatan antar wilayah desa (<i>neighbourhood</i>) sebagai peluang atau potensi pengembangan wilayah desa	Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai (makna) kemandirian desa Mampu menjelaskan gagasan "desa membangun" sebagai cara pandang (visi) kemandirian Mampu melakukan kajian (<i>assessment</i>) potensi kemandirian desa			90
20		8.2. Pengembangan Wilayah Desa		Mampu menjelaskan prinsip, nilai dan pengertian pengembangan wilayah desa Mampu melakukan kajian (<i>assessment</i>) sumber daya desa yang potensial untuk memperkuat pengembangan kawasan desa			90
21	9. Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.1 Analisis Sosial Ketidakberdayaan	Memahami pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai	Melakukan analisis sosial untuk mengidentifikasi			180



1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
			paradigma baru pembangunan menuju kedaulatan dan kemandirian Desa	faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial, ekonomi, budaya yang ada di desa.			
22		9.2. Pemberdayaan Menuju Perubahan Sosial Desa		Mampu menjelaskan arti pemberdayaan masyarakat desa sebagai jalan menuju perubahan sosial desa Mampu menjelaskan pemberdayaan masyarakat desa sebagai penerapan nilai-nilai pembangunan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa			135
23	10. Peran dan Strategi Tenaga Ahli dalam Pemberayaan Masyarakat Desa	10.1 Kecakapan Komunikasi Sosial Tenaga Ahli	Memahami peran dan menentukan sikap ideal dan memahami peran strategis pendamping dalam pemberdayaan masyarakat desa	Mampui memahami kecakapan komunikasi sosial sebagai konsep pembentukan citra diri seorang Tenaga Ahli Mampu menentukan strategi			90



1	MATERI PELATIHAN		KOMPETENSI DASAR	INDIKASI KEBERHASILAN	METODE	MEDIA	JP
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN					
2	3	4	5	6	7	8	
			Menentukan langkah-langkah strategis dalam pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat desa.	membangun komunikasi sosial yang efektif sebagai Tenaga Ahli yang menjalankan peran serta fungsinya dalam mendorong terwujudnya visi Undang-undang Desa			
		10.2. Peran Strategis Tenaga Ahli		Mampu memahami peran dan menentukan sikap ideal dan memahami peran strategis pendamping dalam pemberdayaan masyarakat desa Mampu menentukan langkah-langkah strategis dalam pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat desa.			135